



**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO : 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034
Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan
Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih**

Skripsi

Oleh
Vivin Erni Hidayan Waruwu
2016310073

Bandung
2021



**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan**

*Terakreditasi A
SK BAN-PT NO : 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034
Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan
Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih**

Skripsi

Oleh
Vivin Erni Hidayan Waruwu
2016310073

Pembimbing

Pius Sugeng Prasetyo, Ph.D

**Bandung
2021**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Vivin Erni Hidayan Waruwu
Nomor Pokok : 2016310073
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. : 

Sekretaris

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. : 

Anggota

Indraswari, M.A., Ph.D. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivin Erni Hidayan Waruwu
NPM : 2016310073
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 juli 2021



Vivin Erni Hidayan Waruwu

ABSTRAK

Nama : Vivin Erni Hidayan Waruwu
NPM : 2016310073
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden yang merupakan pelaksana dari Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik dengan mengukur distribusi frekuensi, *central tendency* yaitu median dengan menggunakan bantuan *Statistical Package for The Social Science (SPSS)*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposif dan menggunakan teknik penskalaan *Likert*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: faktor-faktor implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terpenuhi dan dilakukan secara baik pada implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut merupakan alasan keberhasilan implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih.

Kata kunci: implementasi, komunikasi, disposisi, sumber daya, struktur birokrasi, PIPPK.

ABSTRACT

*Name : Vivin Erni Hidayan Waruwu
NPM : 2016310073
Topic : Implementation of Peraturan Wali Kota Bandung No. 034 tahun 2019 concerning the Implementation Technical Guidelines Regional Empowerment and Development Innovation Program in Sukagalih Village*

This study aims to determine what factors lead to the successful implementation of the Regional Empowerment and Development Innovation (PIPPK) program in Sukagalih Village, Sukajadi District, Bandung City. The theory used in this study is Edward III's theory of the factors that influence implementation, namely communication, resources, disposition, and employee structure..

The research method used in this study is a quantitative method. The method of data collection was carried out by conducting interviews and distributing questionnaires to 30 respondents who were implementers of the Regional Development and Empowerment Innovation Program in Sukagalih Village. The data analysis used was descriptive statistical analysis by measuring the frequency distribution, the central tendency, namely the median, using the Statistical Package for The Social Science (SPSS). The sampling technique used purposive sampling technique and using Likert scaling technique.

The results of this study indicate that: the implementation factors including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are fulfilled and carried out well in the implementation of the Regional Development and Empowerment Innovation Program in Sukagalih Village. The fulfillment of these factors is the reason for the successful implementation of the Innovation Program for Empowerment and Regional Development in Sukagalih Village.

Keywords: implementation, communication, disposition, resources, bureaucratic structure, PIPPK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir dari penulis dan menjadi syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, khususnya pengetahuan tentang sistematika penulisan karya tulis. Dalam proses penulisan ini juga, penulis menghadapi berbagai hambatan karena kurangnya pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari sistematika penulisan dan sumber-sumber teori yang benar. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, Ph.D selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi.
3. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
4. Bapak Manahati Waruwu dan Ibu Yaami Gulo beserta keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para donatur beasiswa SPN (Stichting Parahyangan Nederland) yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Unpar.
6. Teman-teman SPN 9 angkatan 2016 (Mega, Septi, Pemita, Nia, Mey, Gregorius, Lius, Ose, Sihol, Karel, Fabian, Franky, Charles, Rian, Boas,

Andreas, dan Abas) sebagai keluarga kedua peneliti di Bandung dan teman seperjuangan di Unpar.

7. Teman-teman kosan (Septi, Lita, Mega, Niran, Nur, Pem, Vian, Sela, dan Yopi) yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan IMN (David, Arman, Epi, Ben, Frider, Thody, Best, Boy, Vicky dan teman teman lainnya), khususnya Bapak Elisati Hulu sebagai pembina IMN Unpar dan menjadi orang tua bagi kami.
9. Keluarga besar PMKRI Bandung, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis selama kuliah.
10. *Last but not least, i wanna thank me for believing me, for doing all this hard work, for never quitting, for tryna do more right than wrong, and for just being me at all times, cheers!!.*

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang belum penulis sebutkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandung, 16 Juli 2021

Vivin Erni H. Waruwu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	10
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.3 Perspektif Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.4 Model implementasi kebijakan publik.....	16
2.4.1 Komunikasi (<i>communication</i>).....	17
2.4.2 Sumber Daya (<i>Resource</i>).....	18
2.4.3 Disposisi (<i>Disposition</i>).....	20
2.4.4 Struktur birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	21
2.5 Konsep Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung.....	23
2.5.1 Definisi PIPPK.....	23
2.5.2 Prinsip Dasar PIPPK.....	23
2.5.3 Jenis kegiatan PIPPK.....	24
2.5.4 Ruang lingkup PIPPK.....	25

2.5.5	Stakeholder PIPPK	27
2.5.6	Mekanisme Pelaksanaan PIPPK.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Rancangan Penelitian.....	32
3.2	Populasi dan Sampling.....	33
3.3	Pengukuran variabel	34
3.3.1	Definisi Operasional	34
3.3.2	Operasionalisasi Variabel	35
3.3.3	Skala Pengukuran	37
3.3.4	Uji Validitas dan Reliabilitas	38
3.4	Prosedur Pengumpulan Data	43
3.4.1	Kuesioner	43
3.4.2	Wawancara	44
3.5	Analisis Data	45
BAB IV	OBJEK PENELITIAN	48
4.1	Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK).....	48
4.2	Kelurahan Sukagalih.....	50
4.2.1	Kondisi Geografis.....	50
4.2.2	Struktur Organisasi	51
4.2.3	Visi dan Misi Organisasi.....	51
BAB V	HASIL TEMUAN DAN ANALISIS	53
5.1	Implementasi PIPPK di Kelurahan Sukagalih.....	53
5.2	Deskripsi Faktor Implementasi.....	57
5.2.1	Komunikasi	57
5.2.2	Sumber Daya	61
5.2.3	Disposisi.....	64
5.2.4	Struktur Birokrasi	66
5.3	Analisis data	68
5.3.1	Faktor Implementasi Kebijakan	69
5.3.1.1	Komunikasi	69
5.3.1.2	Sumber Daya	71

5.3.1.3 Disposisi.....	73
5.3.1.4 Struktur Birokrasi	74
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan.....	35
Tabel 3. 2 Skala Pengukuran	38
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas	39
Tabel 3.4 Pedoman Menentukan Tingkat Keandalan Instrumen Ukuran dari Cronbach	42
Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas.....	42
Tabel 5. 1 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Komunikasi	58
Tabel 5. 2 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Sumber Daya.....	62
Tabel 5. 3 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Disposisi	65
Tabel 5. 4 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Struktur Birokrasi.....	67
Tabel 5. 1 Realisasi Anggaran PIPPK Kelurahan Sukagalih	56
Tabel 5. 2 Komunikasi	58
Tabel 5. 3 Skor Hasil Jawaban Responden Faktor Komunikasi	59
Tabel 5. 4 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Sumber Daya.....	62
Tabel 5. 5 Skor Hasil Jawaban Responden Faktor Sumber Daya	63
Tabel 5. 6 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Disposisi	65
Tabel 5. 7 Skor Hasil Jawaban Responden Faktor Disposisi.....	65
Tabel 5. 8 Deskripsi Hasil Penilaian Faktor Struktur Birokrasi.....	67
Tabel 5. 9 Skor Hasil Jawaban Responden Faktor Struktur Birokrasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Implementasi George Edward III	22
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Sukagalih.....	51
Gambar 5. 1 Pengkategorian Faktor Komunikasi	60
Gambar 5. 2 Pengkategorian Faktor Sumber Daya	64
Gambar 5. 3 Pengkategorian Faktor Disposisi.....	66
Gambar 5. 4 Pengkategorian Faktor Struktur Birokrasi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	81
Lampiran 2: Hasil Jawaban Responden (Kuesioner)	85
Lampiran 3: Output Tabel Frekuensi Faktor Komunikasi	86
Lampiran 4: Output Tabel Frekuensi Faktor Sumber Daya	86
Lampiran 5: Output Tabel Frekuensi Faktor Disposisi	87
Lampiran 6: Output Tabel Frekuensi Faktor Struktur Birokrasi	87
Lampiran 7: Uji Validitas	88
Lampiran 8: Uji Reliabilitas	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses atau strategi yang diarahkan untuk mendukung majunya suatu negara, baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Adanya pembangunan ditandai dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kapasitas setiap individu dalam masyarakat suatu negara. Pembangunan tersebut tentunya harus adil dan merata untuk seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memberi ruang agar pembangunan dapat dilaksanakan diseluruh daerah.¹ Untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, masyarakat dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan itu sendiri sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan dapat memaksimalkan tujuan pembangunan. Suatu konsep kebijakan atau program yang tepat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan tersebut di masing-masing daerah serta pembangunan sumber daya manusia.

Salah satu kebijakan yang mendukung pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat adalah Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) yang merupakan salah satu program yang dibuat oleh Walikota Bandung

¹ Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

yang tertuang dalam Perwal Bandung No. 436 tahun 2015 tentang PIPPK.² Program ini dirancang sebagai gerakan yang terpadu untuk mendukung program atau kegiatan Pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 antara lain melalui akselerasi Pembangunan Daerah dengan cara pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, semua pihak diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama PIPPK.³

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam PIPPK pun dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan di tingkat wilayahnya masing-masing, sehingga masyarakat dapat menyampaikan ide dan gagasannya atas suatu program yang dilaksanakan. Hal tersebut ditegaskan dalam tujuan utama pelaksanaan PIPPK yaitu untuk mewujudkan kerjasama antara aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan serta untuk meningkatkan tugas atau peran seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan melalui program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.⁴ Dengan demikian, program ini memiliki tujuan bukan hanya untuk melakukan

² Peraturan walikota bandung No. 436 tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

³ Akbar, I “Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Lokal: Studi di Kota Bandung”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol 5 No. 2 2018, hal. 102

⁴ *Ibid*, 105.

pembangunan secara fisik namun juga untuk memberdayakan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan proses implementasi kebijakan yang baik agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal.

Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.⁵ Dalam hal ini PIPPK sudah diimplementasikan sejak tahun 2015 atau sudah berjalan selama kurang lebih lima tahun di Kota Bandung.

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang ikut melaksanakan PIPPK. Kecamatan Sukajadi terdiri dari lima Kelurahan yaitu, Kelurahan Sukagalih, Kelurahan Pasteur, Kelurahan Cipedes, Kelurahan Sukabungah, dan Kelurahan Sukawarna. Kecamatan Sukajadi cukup berprestasi dalam pelaksanaan program ini, dimana pada acara Gebyar PIPPK tahun 2018, Kecamatan Sukajadi mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Bandung atas realisasi program tertinggi se-Kota Bandung. Dalam acara tersebut, Kelurahan Sukagalih juga mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat ke-6 dalam lomba posyandu yang diadakan di tingkat kecamatan.⁶ Dengan adanya pemberian penghargaan tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa daerah telah melaksanakan PIPPK dengan kinerja yang baik yang dalam hal ini adalah daerah Kelurahan

⁵H.AKIB, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, hal 2

⁶ Adryan, "Kecamatan Sukajadi, Bandung Kulon, Babakan Ciparay dan Lengkong Dianugerahi PIPPK Awards",

Sukagalih sehingga dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Kelurahan Sukagalih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu kelurahan yang berhasil dalam implementasi program PIPPK dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program PIPPK di Kelurahan Sukagalih dapat berhasil dan menerima penghargaan dari pemerintah Kota Bandung.

Penelitian ini akan melihat proses implementasi dari 4 faktor berdasarkan teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pertama, Komunikasi merupakan proses penyampaian kebijakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kelancaran proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar ketika informasi terkait kebijakan dapat ditransmisikan dengan tepat, akurat, jelas serta konsisten. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukagalih berikut:

Penyampaian informasi tentang PIPPK di Kelurahan Sukagalih, kita melakukan pertemuan atau rapat dengan ketua RW dan ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, dan bahkan tokoh pendidikan juga kita undang supaya semua masyarakat dapat terlibat dalam program ini. Jadi dalam pertemuan ini kita jelaskan kepada para perwakilan LKK tentang apa tujuan dari program ini dan bagaimana pelaksanaannya nanti oleh masing-masing LKK. Kita juga memiliki satu orang fasilitator untuk setiap LKK, jadi setiap ada informasi bisa lebih mudah disampaikan lewat fasilitator. Dalam pelaksanaan kegiatan PIPPK yang rutin pun kita informasikan melalui masjid agar masyarakat tidak lupa. Kegiatan rutin ini misalnya gotong royong, ronda, dan pembersihan lingkungan.

Kedua, Sumber Daya. Sebuah kebijakan dapat di implementasikan apabila sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Sumber daya tersebut berupa staf, fasilitas, dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan atau program. Seperti pernyataan staf Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukagalih di bawah ini:

Kalau sumber daya sebenarnya sudah terpenuhi karna kita di Kelurahan Sukagalih sebagian besar mengandalkan kekuatan warga dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Semua pelaksanaan kegiatan harus melibatkan warga dan ikut bergotong royong dalam melakukan pembangunan.

Ketiga, Disposisi. Faktor ini menjelaskan bahwa ketika implementor sebuah kebijakan memiliki kemauan serta perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan maka kebijakan dapat dijalankan dengan baik oleh para implementor, seperti dijelaskan oleh Kepala Seksi Ekonomi di Kelurahan Sukagalih berikut ini:

Kalau kita di Kelurahan Sukagalih semua orang sangat antusias melakukan kegiatan PIPPK karena kita merasa bahwa kita melakukannya untuk kepentingan dan kebaikan kita sendiri.

Keempat, Struktur Birokrasi. Kegiatan implementasi harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi (pembagian tugas) agar implementor tidak bingung akan prosedur kerja serta apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Seksi Ekonomi berikut ini yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan PIPPK ini sudah jelas ya ada pembagian tugasnya, kita melibatkan semua pihak dengan peran masing-masing. Ada tim pengarah, tim pengawas, dan tim pelaksana. Intinya semua orang punya tugas masing-masing apalagi masyarakat yang menjadi pelaksana utama dari kegiatan PIPPK ini.

Berdasarkan empat faktor diatas, Kelurahan Sukagalih telah melaksanakan kempatnya dalam pelaksanaan PIPPK seperti Komunikasi melalui pertemuan atau rapat dengan para stakeholder dan pihak terkait untuk sosialisasi kebijakan PIPPK. Selain itu, terdapat satu fasilitator untuk satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sehingga penyampaian setiap informasi dapat diteruskan kepada masyarakat dengan efektif. Kemudian, faktor sumber daya menunjukkan Kelurahan Sukagalih melibatkan semua warga sebagai pelaksana program sehingga dari segi sumber daya manusia yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Disposisi setiap stakeholder PIPPK Kelurahan Sukagalih ditunjukkan dengan adanya keinginan para LKK serta seluruh warga untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor terakhir yaitu Struktur birokrasi, menunjukan setiap individu di Kelurahan Sukagalih memiliki pembagian tugas yang jelas mulai dari tim pengarah, tim pelaksana, dan fasilitator.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari kebijakan PIPPK di Kelurahan Sukagalih dengan menggunakan teori George C. Edward III. Dengan demikian, maka judul penelitian ini adalah “ **Implementasi Peraturan Walikota Bandung No. 034 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembagunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui keberhasilan pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan menjadi bukti konkret mengenai konsep kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik, serta diharapkan dapat menciptakan wawasan dan pengetahuan yang baru dan luas ataupun menjadi referensi bagi pihak manapun untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis maupun implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini berguna untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan publik terkait Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan pada Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dengan demikian, dapat melihat proses implementasi program yang dilakukan oleh Kelurahan terkait. Selain itu, dalam penelitian ini juga dapat melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlaksananya implementasi PIPPK di Kelurahan Sukagalih. Dengan mengetahui informasi-informasi tersebut, penelitian ini diharapkan menjadi umpan balik bagi pemerintah selaku perumus dan pengembang kebijakan terkait PIPPK agar program ini dapat terus berkesinambungan.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bab I. Pada Bab I ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Bab ini memuat tentang kerangka teori atau teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori

dalam bab II ini akan menjadi acuan peneliti dalam mengukur masalah yang akan diteliti.

3. Bab III. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.
4. Bab IV. Bab ini memberikan gambaran umum tentang PIPPK dan objek penelitian.
5. Bab V. Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil temuan dan analisis data yang telah diperoleh peneliti di lapangan.
6. Bab VI. Bab ini memuat kesimpulan penelitian secara keseluruhan beserta saran.